

Konflik Sosial dengan Tindak Kekerasan dan Peranan Komunikasi

Santoso S. Hamijoyo

ABSTRAK

Adanya konflik sosial, apalagi yang disertai tindak kekerasan adalah bukti bahwa ada "kemacetan komunikasi" antarberbagai golongan dalam masyarakat kita yang majemuk. Jika diakui bahwa komunikasi adalah bagian dari proses budaya yang beradab, maka komunikasi dengan berbagai kiat dan pendekatannya bisa dipercaya untuk berperan meredam atau paling sedikit mengantisipasi datangnya konflik.

Pendahuluan

Konflik sosial, bahkan mengarah dan berubah menjadi tindak kekerasan, sudah selang lama kita saksikan, mungkin kita alami sendiri. Perkelahian antarpelajar, baku hantam antarwarga kelompok-kelompok kepentingan, baku serang antarwarga RT dan antarwarga desa, sudah bukan barang baru dalam masyarakat kita. Konflik-konflik itu, pada umumnya bersifat spontan, dipicu oleh dorongan-dorongan sesaat, dilandasi sebab musabab yang kurang rasional bahkan sering hanya karena alasan-alasan 'sepele'. Hanya korban yang ditimbulkan tidak sepele, tidak tanggung-tanggung, bahkan ada yang sampai mati.

Namun, dalam beberapa tahun akhir-akhir ini, kita menyaksikan maraknya dan makin beraninya pelaku konflik dengan tindak kekerasan yang sedikit banyak terencana, tidak lagi bersifat spontan, sering melibatkan pelaku dalam jumlah besar. Termasuk dalam tindak kekerasan ini adalah perilaku agresif, pembegalan, perampokan, penjarahan. Tidak jarang diperparah dengan penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, di samping pengrusakan harta benda. Motifnya mempunyai kisaran cukup lebar, dari sekadar

bertahan hidup sampai pemerayaan diri, dari rasa kecewa sampai frustrasi, dari ungkapan iri dengki sampai pelampiasan dendam kesumat. Konflik dengan tindak kekerasan itu banyak yang merupakan kekerasan kelompok (*group violence*), karena isu atau masalah yang melandasinya bukan lagi individual atau personal, tetapi sosial. Aksi-aksinya cukup terorganisasi, namun tidak selalu terkait kelembagaan secara langsung.

Kategori konflik dengan kekerasan yang berbahaya memang dirancang secara rapih, canggih, dan dengan *timing* yang terpilih tepat. Perencanaan dan operasinya 'tertutup atau rahasia' (*covered operation*). Contoh klasik tindak kekerasan jenis ini adalah *agresi sistematis terlembagakan* atau terorisme resmi dengan skala internasional yang mengancam atau menghancurkan pemerintah negara lain. Atau yang berskala domestik yang dilakukan pemerintah otoriter atau kelompok kepentingan yang sangat berkuasa, atau dapat dilancarkan juga oleh kelompok militan terhadap golongan-golongan yang dicap sebagai musuh. Kita masih ingat peristiwa 'Petrus' (Penembakan Misterius), 'Malari' (Lima belas Januari), Tanjung Priok, Lampung, Banyuwangi, Sambas, untuk menyebut

beberapa contoh. Awalnya, berupa perbedaan pendapat atau keyakinan, atau persaingan kepentingan, berkembang menjadi pertentangan, pengucilan, diskriminasi, penculikan, pembunuhan gelap, serangan terbuka, pembasmian yang dibumbui 'SARA'. Sifatnya 'tertutup', sehingga awalnya sulit mengidentifikasi siapa atau lembaga mana yang melakukannya. Kalau diusut pun secara hukum selain sulit juga berbahaya, karena disponsori oleh kelompok yang kuat atau memegang kendali kekuasaan.

Apakah Konflik Kekerasan Itu Gejala Baru?

Mungkin banyak di antara kita yang tersentak karena begitu gampangnya timbul konflik. Kebanyakan konflik diakhiri dengan tindak kekerasan yang benar-benar kejam, sekonyong-konyong, tidak terkendali, sehingga bagi orang awam sangat mengejutkan. Namun, kita harus mengakui bahwa sejarah kita sebelum kemerdekaan dilandasi dengan banyak sengketa, pemberontakan, dan peperangan antara kerajaan dan kesultanan mulai dari Sabang sampai Merauke. Demikian pula persaingan dan perebutan kekuasaan di dalam (intra) istana kerajaan (revolusi istana) sering pula terjadi, melibatkan rajanya sendiri, putera mahkota dan pangeran, hulubalang atau panglima, permaisuri, pemuka spiritual, dan lain sebagainya. Banyak tercatat tentang intrik, siasat pengukuhan kekuatan, konflik dan perang saudara yang melibatkan rakyat banyak. Tidak pelak lagi akibatnya adalah lumpuhnya pemerintahan, hancurnya perekonomian, merosotnya keamanan dan ketenteraman masyarakat. Yang menjadi korban untuk jangka waktu lama selalu rakyat kecil. Celakanya penderitaan ini berjalan ratusan tahun.

Datangnya kolonialis-kolonialis Portugis, Spanyol, Inggris, Belanda, dan lain-lain, telah melengkapi penderitaan umum dengan berbagai kekejaman berupa hukuman yang semena-mena terhadap perlawanan rakyat pribumi, termasuk pembantaian massal sistematis, kerja paksa, pembuangan dan penarikan pajak mencekik rakyat. Penindasan dan kekejaman-kekejaman selama

beratus tahun ini telah ikut membentuk situasi konflik yang kronis dan mentalitas kecewa, curiga dan prasangka, frustrasi dan agresi.

Penindasan dan kekejaman itu terkait erat secara kelembagaan. Oleh sebab itu, konflik yang timbul adalah konflik sosial, konflik kelembagaan, bukan konflik antarindividu. Dan tindak kekerasan yang kemudian mencuat adalah kekerasan kelompok (*group violence*) yang secara tertutup atau terbuka didukung atau diprakarsai oleh masing-masing pimpinan lembaga yang saling berseberangan kepentingannya. Jadi, kesimpulannya, konflik dengan kekerasan *bukanlah* gejala sosial baru!

Tindak kekerasan kelompok biasanya mempunyai musuh sasaran yang jelas. Berlakulah proses psikologi *stereotype*. 'Musuh' ditentukan berdasarkan kriteria atau definisi yang sudah dirumuskan sebelumnya berdasarkan hubungan afliasinya. Yang penting bukan perbuatannya jahat atau tidak, tetapi masuk golongan mana dia. Kesalahan ditentukan oleh hubungannya (*guilty by association*). Inilah yang disebut *objective enemy*, musuh objektif. Ingat "Setan-setan kota dan desa" zaman Orla, dan "Litsus" zaman Orba? Keduanya adalah *pembasmian ideologis*. Dengan demikian, konflik sosial baik sebagai bibit maupun sebagai gejala nyata sudah dilembagakan secara resmi. Reaksinya jelas, masyarakat berkesimpulan bahwa kekerasan adalah satu-satunya jalan ke luar. Kekerasan dikuatirkan menjadi membudaya. Pada waktu kita memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1945, kita bukan generasi manusia atau masyarakat yang baru dan 'bersih' dari perbedaan dan konflik. Terbawa serta dalam proklamasi adalah serpihan-serpihan lama yang terlekat pada feodalisme, etnosentrisme, rasialisme, militansi keagamaan dan ideologi politik. Semua ini, dengan ciri-ciri negatifnya, membias pada sikap dan perilaku kita sebagai 'bangsa baru' yang merdeka. Dan proses ini terus menggelinding sampai setengah abad merdeka.

Kekuasaan, status, peran, kesempatan, dan keberuntungan pada umumnya tetap saja terfokus pada mereka yang berkuasa, yang tinggi kedudukan dan besar peranannya, yang banyak

menikmati kesempatan dan keberuntungan. Bukan terfokus pada orang biasa, rakyat kebanyakan, bukan pula pada ‘arus’ bawah yang merasa tetap terpukul. Tetap saja ada bibit-bibit kekecewaan dan frustrasi karena merasa menjadi korban perbedaan, diskriminasi, ketidakadilan.

Mungkin saja revolusi bisa mengurangi perbedaan dan kesenjangan, namun setiap revolusi atau perubahan besar selalu meninggalkan korban dan melahirkan bibit-bibit baru yang *contrarevolutioner*; atau *contra-establishment*. Apalagi kalau ada golongan-golongan, yang meskipun bukan menjadi korban revolusi, tetap merasa tidak menikmati hasil-hasil revolusi. Yang menjadi *penguasa baru* cenderung menjadi *feodal baru* dan melahirkan *sistem otoriter baru* tanpa mekanisme *check and balance* dan *kontrol sosial* yang melembaga dan dilindungi hukum. Lihat saja, banyak (meskipun tidak semua) camat, bupati, gubernur, dan pejabat-pejabat setara selama Orde Lama dan Orde Baru lebih garang dan korup dari pada Asisten Wedana, *Regent*, dan *Gouverneur* serta *ambtenaar* zaman kolonial dulu.

Otokrasi, Kleptokrasi, Mobokrasi

Disadari atau tidak disadari, negara kita menjadi negara *otokrasi*, dengan pemusatan kekuasaan pada satu orang dengan para pembantunya di pusat sampai daerah. Celakanya, malah menjadi negara *kleptokrasi* terbesar dan paling canggih di dunia. Negara yang diperintah dan dikelola oleh *pencuri*. Ibaratnya, bagaimana rumah tangga tidak makin melarat dan busuk, kalau sang ayah sendiri nyolong dan menjual secara gelap barang-barang antik atau berharga, si ibu sendiri secara diam-diam menggerogoti uang tabungan keluarga, anak-anaknya sendiri berebut mencuri dan menjual pakaian bagus dan perhiasan, demikian pula para pembantu melakukan *mark up* belanja lauk pauk, serta mencuri dan menjual persediaan bahan makanan dan alat dapur, bahkan koran bekas!

Korupsi dalam negara otokrasi, apalagi kleptokrasi selalu merajalela. Sulit diusut, karena peraturan perundangan memang didesain untuk

mempersulit. Demikian pula, aparat penegak hukum banyak dikendalikan oleh kekuasaan, bukan oleh keadilan, kebenaran, dan tertib hukum. Rakyat harus tertib, tetapi anehnya *tidak ada tertib hukum*. Malah banyak tindak penyelewengan ekonomi keuangan yang bersifat resmi (*officially sanctioned*). Dalam situasi demikian, situasi tanpa tertib hukum, kejujuran, keadilan, dan kedaulatan rakyat, maka mudah saja suatu masyarakat atau bangsa akan terjerumus dalam lembah kekacauan dan persengketaan. Kelompok, institusi, masyarakat, atau bangsa yang terpecah-belah bersengketa terhadap dirinya sendiri, tidak akan sanggup bertahan hidup damai, tenteram, dan adab. Yang bertahan justru huru-hara, kekacauan, hujat menghujat, penjarahan, pengeroyokan, amuk massa. Dalam situasi semacam ini, yang berkuasa bukan siapa-siapa, melainkan gerombolan liar atau *mob*, jadi yang berlaku bukan demokrasi, tetapi *mobokrasi*! Yang jadi lawan atau musuh tidak jelas, siapa pun bisa jadi musuh dan sasaran gerombolan liar berdasarkan sikon sekonyong-konyong. Konflik, yang berkembang menjadi tindak kekerasan gerombolan, tidak jarang terjadi di negara kita yang luas dan majemuk serta penuh kesenjangan ini yang mengandung berbagai pertentangan antara berbagai kelompok kepentingan, baik yang *latent* maupun yang *manifest*.

Oleh karena itu, *mempelajari sejarah konflik dan tindak kekerasan di dalam masyarakat kita pada hakekatnya adalah mempelajari sejarah bangsa dan negara Indonesia itu sendiri!*

Sebab-sebab Tumbuhnya Konflik

Sekarang mari kita coba telusuri apa yang menjadi sebab-sebab yang melandasi konflik dan tindak kekerasan yang siapa tahu mungkin menjadi *salah satu ciri masyarakat* kita. Ditekankan pada istilah ‘masyarakat’, karena sebagai individu mungkin saja seseorang itu baik, damai, toleran, dsb. Namun, karena ada faktor-faktor kekuatan sosial (*social force*), maka sifat-sifat pribadi itu bisa cepat berubah, mengikuti arus massa atau kelompok situasional yang belum tentu berakal

sehat, damai, atau toleran. Faktor kekuatan sosial ini bisa saja tumbuh dari landasan-landasan sikap iri, ketidakpuasan atau kekecewaan politik, ekonomi, kultur, bahkan terselip warna-warna etnik, religius, rasial, dan sebagainya. Perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam kelompok, atau antarkelompok dalam masyarakat, yang kemudian berkembang menjadi konflik sosial, bahkan konflik sosial dengan tindak kekerasan (*violent social conflict*) diduga tumbuh karena banyak sebab. Misalnya (sengaja tidak disusun menurut klasifikasi yang sistematis atau *mutually exclusive*):

1. Kurangnya, atau hilangnya kesempatan yang sama untuk bergerak atau berusaha secara wajar (*equality*).
2. Pembagian yang kurang adil dari hasil pembangunan berupa kekayaan atau kesejahteraan materiil, spiritual dan sosial (*equity*).
3. Pengangguran dan kemelaratan kronis.
4. Perasaan putus asa.
5. Perasaan tiadanya keadilan, kejujuran dalam hidup bermasyarakat sebagai warga, termasuk perasaan dilecehkan harga dirinya, dihina, disingkirkan, dikucilkan.
6. Perasaan tertindas, takut, dan terancam karena kurangnya memperoleh perlindungan hukum, penerapan standar ganda dalam hukum dan peradilan, termasuk lemahnya penegakan hukum secara tertib dan adil.
7. Tersumbatnya jalur-jalur kebebasan politik, ekonomi, dan sosial, termasuk kebebasan pengamalan agama atau kepercayaan.
8. Kurang berfungsinya secara baik lembaga-lembaga sosial, politik, ekonomi keamanan dan lain sebagainya, termasuk lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, menurut status, peran dan tugas yang seharusnya ditegakkan.
9. Sikap mental budaya *indolent* (malas-lamban) di kalangan pimpinan dan pelaku lembaga-lembaga penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kurang sigap dan cepat bertindak manakala ada keluhan, ketegangan, atau masalah-masalah kritis lainnya. Seolah-olah mental kita

belum siap menghadapi perubahan dan masalah besar. Umumnya menunggu dan menunda-nunda sampai masalahnya menjadi parah dan meledak! Kita sering menganggap segala sesuatunya serba mudah, beres. Dari 'mudah-mudahan' akhirnya menjadi 'memudah-mudahan'!

10. *Kesalahan dalam persepsi diri* masyarakat, terutama golongan menengah ke atas umumnya, termasuk mereka yang duduk dalam eselon pimpinan dari berbagai tingkatan. Kita sering menganggap bangsa ini adalah sabar, ramah-tamah, menghargai prinsip-prinsip musyawarah, bijaksana, suka tersenyum, dan lain sebagainya. Padahal sebagai bangsa manusia biasa (*human race*) kita bisa khilaf, emosional, irasional, kurang efisien, menghambur-hamburkan sumber yang terbatas, takut pada kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
11. Semua bangsa pasti pernah mengalami krisis. Yang menjadi persoalan bukan hanya krisisnya saja, tetapi terutama *bagaimana* suatu bangsa menghadapi krisis-krisisi itu. Kita ingat, *alangkah bedanya* bangsa Korea dan Thailand dibandingkan dengan kita dalam menghadapi krisis moneter pada waktu lalu. Tampak jelas betapa santainya dan lambannya kita menghadapi krisis itu. Seolah-olah tidak ada tekad kuat atau determinasi. Jelas tidak tampak wajah dan perilaku yang menggambarkan adanya *sense of crisis*.
12. Kurangnya *sense of crisis* ini merupakan cermin dari lemahnya *sense of responsibility* (rasa berkewajiban melaksanakan tugas yang diemban). Ini memang *typical* dari masyarakat yang belum bermental sehat dan dewasa. Seorang pemimpin sudah diberi tugas kewajiban (*responsibility*), dan oleh karenanya ia berhak mendapatkan wewenang (*authority*). Namun, dalam sistem otoriter, ia merasa tidak perlu atau enggan melaksanakan pertanggungjawaban (*accountability*) kepada publik. Akibatnya, ia bisa berbuat sewenang-wenang tanpa kontrol sosial. Ia selalu bisa memberi hukuman, tetapi ia sendiri kebal

-
- hukum.
13. Komunikasi macet, padahal komunikasi adalah bagian mutlak dari proses budaya yang adab. *'Komunikasi adalah penciptaan kebersamaan dalam makna.'* Dalam masyarakat yang kurang adab dan demokratis, sulit terjadi komunikasi yang wajar, karena semua makna menjadi hak tafsir si penguasa. Slogannya adalah 'sambung rasa', namun rasa-rasanya tidak ada yang 'nyambung'. Siaran berita adalah siaran pandangan penguasa. Pers yang bertanggung jawab adalah pers yang harus memberikan pertanggungjawaban kepada penguasa yang memberikan izin terbit bukan kepada publik. Kementerian Penerangan adalah 'Kementerian Kebenaran' (*Ministry of Truth*). Menggembirakan, dalam kurun waktu setahun terakhir ini telah terbit secercah harapan akan hidupnya demokrasi pers kita. Demokrasi pers kita diharapkan bisa menjadi jembatan tumbuhnya komunikasi interaktif yang wajar antara masyarakat dan penguasa.
 14. Kurang sekali interaksi dialogis vertikal antara masyarakat dan penguasa dan horisontal antara lembaga satu dengan lembaga lainnya, karena lupa berpedoman pada visi dan misi nasional sebagai tersebut dalam Pembukaan UUD 1945 yang telah kita sepakati, telah terbukti memperlemah keberdayaan rakyat dan kewibawaan lembaga-lembaga utama yang sangat mengganggu ketenteraman masyarakat dan kesejahteraan umum.
 15. Terus merosotnya kewibawaan pemerintah, termasuk aparat keamanan, kejaksaan, kehakiman, birokrasi di semua departemen, perbankan, perdagangan dan keuangan. Asal muasalnya jelas, yaitu tiadanya supremasi hukum, keadilan dan kejujuran yang ujung-ujungnya membuat rakyat, terutama kelompok-kelompok militan, menjadi beringas dan makin beringas. Histeria massa dimanfaatkan elemen-elemen yang a-sosial dan a-nasional. Massa bagaikan mencium darah dan ingin ada lebih banyak darah tumpah. Jika tidak ada penyelesaian yang tepat dan segera, kehidupan bermasyarakat secara

adab bahkan kelangsungan eksistensi republik ini akan terancam!

Perlu Penanganan Konflik

Daftar sebab-sebab konflik kekerasan tadi, kalau kita mau, masih bisa diperpanjang. Kesimpulannya, masyarakat kita masih *belum mencapai kualitas kehidupan sosial* yang memadai, dan sebagai bangsa kita *masih belum cerdas kehidupannya*.

Masalah-masalah mulai nomor 1 s.d. 7, tergolong faktor-faktor objektif yang menjadi bukti *frustrasi kronis berkepanjangan*. Masalah-masalah nomor 8 dan seterusnya dapat digolongkan sebagai *kekuatan-kekuatan sosial* yang memicu frustrasi sehingga meledak menjadi konflik kekerasan. Akibatnya, bermacam ragam, seperti *agresi* yang korbannya belum tentu ada kaitannya dengan penyebab frustrasi. Emosi yang meledak-ledak (tidak rasional) adalah cerminan dari *primitivisasi*, kembali ke sikap dan perilaku kurang dewasa. Ini ditunjukkan, antara lain, oleh banyak pelaku politik kita, ketika kalah pemilu atau tokoh idolanya gagal meraih jabatan. Terjadilah proses *redefinisi kognitif*, antara lain dengan melemparkan kesalahan pada orang lain dengan membangkit-bangkitkan kesukuan dan kedaerahan. Ini 'lucu', tetapi *sangat berbahaya*, selain bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, juga bagi kehidupan bermasyarakat yang adab. Seharusnya kita mencari penyelesaian lebih maju dari Sumpah Pemuda tahun 1928. Ini malah mundur jauh ke belakang, suatu proses psikologi abnormal yang disebut *regresi*. Seperti biasa, agresi dan regresi memunculkan kambing-kambing hitam yang belum tentu tepat karena proses mental yang berlaku adalah tidak rasional, kurang tajam, diskriminatif, mana yang salah mana yang benar. Awal persoalannya adalah perbedaan konsep dan strategi intern fraksi politik, tetapi ujung-ujungnya malah suatu suku tertentu yang didakwa main.

Bisa diduga, dengan probabilitas yang tinggi, bahwa konflik sosial dengan kekerasan yang melawan hukum masih akan terus ada. Sebabnya? Diperlukan waktu lama untuk mencapai kehidupan

sosial yang berkualitas yang memuat sikap dan sifat demokratik, kejujuran, dan keadilan. Diperlukan waktu lebih lama lagi untuk membangun kehidupan yang cerdas sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, yang memuat sikap hidup yang sigap dan cermat, arif dan waspada, berani dan sabar. Oleh karena itu, kita harus secara serius dan konsisten serta melembaga menanganinya dengan jalan mempelajari, mengantisipasi, mencegah, dan menyelesaikan konflik yang *latent* dan yang *manifest*. Titik-titik rawan untuk terjadi konflik perlu diwaspadai terus menerus, seperti persaingan yang bersangkutan dengan pertanahan, pemukiman, kedaerahan-separatisme, perburuhan, kesempatan berdagang, politik, keagamaan, kepercayaan.

Semua bangsa, tanpa kecuali, mengalami konflik sosial. Tetapi konflik sosial yang berlangsung dengan *intensitas* dan *frekuensi* tinggi, dan *pervasif* yang meletup dalam bermacam-macam situasi di banyak wilayah, serta bercorak tindak kekerasan dan banyak mengarah pada tindakan melawan hukum, kalau tidak ada intervensi yang tepat oleh seluruh jajaran bangsa, akan berakibat kehancuran integritas kita sebagai bangsa manusia yang beradab.

Dapatkan Komunikasi Berperan?

Adanya konflik sosial, apalagi yang disertai tindak kekerasan, adalah bukti bahwa ada *kemacetan komunikasi* antarberbagai golongan dalam masyarakat kita yang majemuk. Jika diakui bahwa komunikasi adalah bagian dari proses budaya yang adab, maka komunikasi dengan berbagai kiat dan pendekatannya bisa dipercaya untuk berperan meredam atau paling sedikit mengantisipasi datangnya konflik.

Meskipun ada krisis perbedaan diametral antara berbagai kelompok kepentingan, namun selama masih terbuka saluran komunikasi, masih ada kemungkinan untuk mencapai saling pengertian, akomodasi, mungkin malah kesepakatan kerjasama dan perdamaian. Oleh karena itu *dialog, musyawarah, deliberation, perlu dilembagakan, dibudayakan.*

Komunikasi bukan propaganda, penyebaran

tak berimbang dari pendapat atau kemauan dari yang kuat kepada yang lemah. Komunikasi bukan sekadar rekayasa media. Komunikasi yang wajar dalam pergaulan masyarakat yang beradab dan demokratis, sekali lagi, adalah *proses penciptaan kebersamaan dalam makna*. Intinya adalah mencari titik temu; *modalitasnya* adalah musyawarah, dialog, negosiasi; *tujuannya* untuk mencapai kesepakatan untuk mendekatkan kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan (*win-win*).

Musyawarah bukan teknik atau taktik pengambilan keputusan, melainkan '*semangat*' (*spirit*) memahami dan menghormati pendapat orang lain, yang '*menjiwai*' (*inspire*) proses pengambilan keputusan. Musyawarah tidak berkonotasi '*kuno*' atau '*modern*', sebab dalam masyarakat yang modern pun dihidupkan prinsip dialog, *deliberation, give and take, accomodation*. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan bersama untuk menghindari konflik. Inilah salah satu esensi demokrasi, yaitu memecahkan masalah perbedaan, menghindari kebuntuan (*dead lock*) secara damai: '*democracy is to resolve conflicting differences by peaceful means.*' Ini bisa terlaksana kalau pihak-pihak yang berkepentingan mempunyai komitmen yang kuat *terhadap tujuan dan cita-cita yang lebih tinggi*, yaitu keselamatan dan perdamaian bangsa dan negara. Jadi, aneh sekali kalau ada orang yang mempertentangkan musyawarah sebagai semangat demokrasi dengan *voting* (sebagai teknik pengambilan keputusan demokratis). Seharusnya musyawarah bisa jalan sejajar dengan *voting*. Susahnya musyawarah selama berpuluh tahun sudah '*dirusak*' makna dan penggunaannya menjadi taktik untuk menggusur pendapat minoritas atau yang berbeda dari penguasa.

Visi dan Missi Nasional

Tujuan dan cita-cita yang lebih tinggi daripada tujuan dan cita-cita kelompok atau golongan ialah visi dan misi nasional kita yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Ada konsep-konsep kunci dalam Pembukaan UUD 1845, ialah:

-
1. Berkehidupan berkebangsaan yang bebas adalah keinginan luhur.
 2. Tugas pemerintah adalah
 - a. Melindungi segenap bangsa.
 - b. Memajukan kesejahteraan umum.
 - c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - d. Melaksanakan ketertiban dunia atas dasar kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan.

Tugas ke-4 biasanya dikonotasikan dengan tugas luar negeri. Tetapi, sebelum beranjak ke luar negeri, sudah sepantasnya kita mulai dengan dalam negeri dulu. Bagaimana kita bisa berperan di dunia, kalau dalam negeri sendiri belum tertib, belum merdeka, belum damai, belum adil. Apalagi kalau dalam negeri sendiri segenap bangsa belum dilindungi, kesejahteraan umum belum maju, dan kehidupannya belum cerdas!

Visi dan misi bangsa itulah yang harus menjadi *inti, isi dan tujuan komunikasi* kita untuk mengantisipasi, bahkan mencegah konflik dalam masyarakat kita. Untuk mencapai tujuan itu, seluruh kekuatan komunikasi perlu dikerahkan untuk membantu semua institusi yang terkait dengan *ketertiban*, bukan kekacauan; *ketenteraman* masyarakat, bukan ketakutan; serta *keadilan* bagi semua, bukan kezaliman. (*Internal order, domestic tranquility, justice for all*). Dengan demikian, pada analisis akhir, komunikasi harus menjadi komunikasi pendukung semua usaha bangsa ini dalam pembangunan dirinya. (*National development support communication*) dengan memprioritaskan dukungan pembangunan masyarakat (*communication development*) di akar bawah.

Komunikasi Konvergen dan Sirkular

Komunikasi yang kita kehendaki bukan propaganda dan bersifat linier, berlangsung satu arah. Komunikasi harus kita rancang (desain) secara *konvergen* dan *sirkular*. Menurut pola ini, sumber dan arus komunikasi tidak tergantung pada komunikator tunggal, siapapun dia itu. Tetapi, siapa pun harus diusahakan dan diberi kesempatan untuk menjadi objek dan subjek komunikasi. Jelasnya, komunikator tidak perlu dimonopoli oleh

para birokrat profesional, atau penguasa karena menguasai media komunikasi, entah melalui institusi yang menjadi wewenang mereka, entah melalui dana dan tenaga yang mereka miliki. Pendeknya, siapa saja yang peduli dan kompeten, yang berdedikasi dan kredibel perlu diberi akses komunikasi dan kesempatan menjadi komunikator. Maksudnya, agar tumbuh gagasan yang inovatif, kreatif, yang 'aneh-aneh' atau 'nyeleneh', dari arus bawah, samping atau atas, dari poros tengah, poros samping atau poros bawah. Syaratnya, asal beritikad baik memakai cara-cara kesejukan, kedamaian, keadilan, dan kejujuran. Dengan terbuka, sopan, saling menghormati, rasional tidak emosional, diharapkan budaya komunikasi musyawarah dan dialogis secara berangsur bisa kita tumbuhkan. Dengan demikian, sikap mental dominan, merasa paling tahu dan paling benar, persaingan tidak sehat, pertentangan atau konflik kekerasan bisa berubah ke arah yang lebih sopan, beradab dan berbudaya.

Komunikasi yang demikian diharapkan secara berangsur bisa secara sadar mengubah iklim sosial atau lingkungan manusia yang kondusif bagi kehidupan demokratis dan beradab, yang tertib, tenteram, rajin bekerja, dan sejahtera lahir dan batin. Perubahan iklim sosial dan lingkungan manusia yang demikian perlu dipelopori dan dikelola oleh para perancang perubahan (*change designers*), pendorong perubahan (*change pushers*), dan pelaksana perubahan (*change implementers*).

Semua golongan 'SARA' harus ikut, terutama para pemuda dan dewasa-muda (*young adults*), karena sejarah *perubahan besar bangsa ini selalu dipelopori oleh golongan muda*. Ingat Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, munculnya Orba, dan terpuruknya Orla, lengsernya Presiden Suharto, terbitnya Reformasi melalui peristiwa Trisakti dan Semanggi. Namun, peran yang diberikan kepada golongan muda harus tetap peranan bebas dan strategis untuk demokrasi dan peradaban baru. Janganlah kita iming-imingi dengan fasilitas dan jabatan-jabatan yang bisa merusak sikap mental mereka. Kita pernah lihat para pemuda kita yang serem-serem pakai seragam tempur, atau pakaian perlente dengan jas dan dasi,

'*pating sliwer*' atau mondar-mandir, bergaya bagaikan birokrat feodal otoriter yang sebelumnya mereka tentang tetapi kemudian mereka tiru. Lebih baik mereka kita beri peran sebagai *Garda Masyarakat Demokrasi dan Beradab (Madani)*. Tugasnya menjadi *pengawas (watch dog)* yang berani, bersih, dan mandiri. Mereka harus kita jadikan dan kita terima sebagai pelopor-pelopor komunikasi dialogis yang kita cita-citakan. Para muda sendiri harus mencari akses yang luas, di dalam dan di luar kampus, dan secara *legitimate* ikut aktif menjadi *perancang, pendorong, dan pelaksana perubahan* ke arah Indonesia yang lebih baik. Bicara tentang akses, kita tidak boleh melupakan *pers* yang akhir-akhir ini sudah melaksanakan fungsi demokratisnya dengan baik.

Modalitas Komunikasi Sambung Makna

Komunikasi untuk mengantisipasi dan meredam konflik, adalah komunikasi yang mengedepankan keadilan, kejujuran, demokrasi, dan peradaban. Semua modalitas boleh kita pakai mulai dari komunikasi massa jarak jauh (*distant communication*) sampai tatap muka (*face-to-face*). Tetapi, yang penting tercapailah inti komunikasi yaitu *sambung makna*. Komunikasi tatap muka belum tentu menyentuh hubungan personal interaktif. Komunikasi massa jarak jauh, selalu bisa berfungsi bagaikan *pedang bermata dua*. Bisa positif, bisa negatif. Misalnya, dengan merekayasa *sensitivitas dan selektivitas* pengetahuan dan persepsi khalayak bisa digiring ke arah yang diinginkan sumber, yang belum tentu memiliki kejujuran intelektual atau moral (*intellectual or moral honesty*).

Pola *crisis reporting* yang sering dianut media massa, satu peristiwa atau krisis dengan skala relatif terbatas bisa 'diledakkan' (*blow-up*) seolah-olah merupakan peristiwa besar dan merata di mana-mana. Dan memang bisa berakibat *proliferasi, efek berantai ke mana-mana*. Khalayak umumnya memang gemar berita peristiwa krisis atau yang kurang wajar bukan yang 'biasa-biasa' saja. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa nonkrisis jarang disebarkan media massa, karena kurang dramatis.

Komunikasi yang kita inginkan ialah yang berimbang. Krisis, termasuk konflik, memang perlu disiarkan; kalau tidak, masyarakat kewaspadaannya tumpul. Tetapi, perlu disiarkan pula secara berimbang peristiwa-peristiwa yang menggambarkan kejadian-kejadian yang sejuk dan guyub, cara-cara damai (*non-violence*) dalam mengusahakan perubahan dan perbaikan negara kita. Misalnya protes, musyawarah, dialog, negosiasi, lobby, petisi, demonstrasi yang tertib, damai dan simpatik, perlu lebih banyak disorot secara lebih dramatis.

Jaringan Komunikasi Terkoordinasi

Banyak pemeran dalam pola komunikasi yang konvergen dan sirkular memerlukan koordinasi yang baik. Maksud koordinasi di sini bukan sentralisasi dengan ada satu instansi pemerintah atau kelompok resmi yang menjadi fokus sentral. Tidak perlu itu. Koordinasi yang dimaksud adalah interaksi yang mengarah kerjasama sebagai tim antara berbagai pemeran komunikasi, atas dorongan masyarakat (*community driven*).

Pendekatan koordinasi bukan administratif, birokratik, melainkan sosio-kultural. Hal ini harus dilakukan di mana saja, ditingkat mana saja. Jadi, satu kota besar, misalnya, bisa ada beberapa pengelompokan pemeran komunikasi. Di taraf kecamatan misalnya, boleh ada kelompok koordinasi, dan ia tidak usah lapor atau *accountable* pada kelompok koordinasi di kabupaten. Biarlah tiap-tiap dan semua kelompok koordinasi *accountable* pada publik di wilayah jangkauannya masing-masing. Ini semua untuk lebih menjamin interaksi dialogis demi kreativitas, kompetisi sehat, partisipasi dan demokrasi, sampai masyarakat di akar bawah (*grassroot community*). NGO atau LSM akar bawah yang independen diharapkan aktif bergerak dalam komunikasi sosial untuk aksi kedamaian dan ketenteraman, antikekerasan. Ditekankan NGO atau LSM akar bawah bukan NGO atau LSM yang modern, canggih, bermodal besar dan SDM yang hebat-hebat, tetapi masih harus membuktikan kedekatannya dengan rakyat.

Institusi-institusi pemerintah atau swasta yang bergerak dalam komunikasi demi kedamaian,

ketenteraman, anti kekerasan tentunya didorong untuk berkoordinasi sendiri demi terselenggaranya interaksi secara transparan dan berkelanjutan (*sustainable*).

Untuk lebih melembagakan secara dinamis komunikasi sosial anti kekerasan yang dimaksud, perlu ada kelompok-kelompok pengamat konflik sosial di mana saja. Mereka ini boleh saja berdiri dan bekerja sendiri, tetapi mungkin lebih efektif jika mau menyusun Jaringan Komunikasi Sosial (*Social Communications Net*). Tujuannya, selain mengupayakan interaksi, kerjasama, sinergi, dan lain sebagainya, juga menarik pelajaran dan mengkonsolidasikan pengalaman yang akan sangat berguna bagi pengembangan peradaban kita sebagai bangsa.

Selain itu, perlu dibombong (*encouraged*) berdirinya “pusat-pusat studi konflik dan kekerasan” sebagai lembaga swasta yang independen. Bisa menjadi bagian struktural universitas, atau cukup menggalang kerjasama dengan universitas terdekat. Tema atau isu yang dipelajari adalah konflik sosial, integrasi sosial, masalah-masalah sosio-kultural, dan mekanisme sosial masyarakat dalam mencegah atau menanganinya.

Berdirinya “lembaga dokumentasi, pencatatan dan pelaporan atau publikasi masalah konflik dan kekerasan” adalah satu konsekuensi logis, dan perlu kita sokong. Kita belum banyak mengenal diri kita sendiri, termasuk konflik sosial dan tindak kekerasan yang sudah lama “menghiasi” perjalanan sejarah kita sebagai masyarakat yang majemuk. Di tingkat nasional dan propinsi, atau wilayah meliputi beberapa propinsi, perlu ada semacam Dewan atau Kelompok Penasihat Konflik

Sosial (*Advisory Group on Social Conflicts*). Tugasnya, antara lain mengembangkan satu *Clearing House*, dan memberi saran penunjang bagi pemerintah pusat dan daerah, serta alat-alat penegak keamanan. Untuk menjamin kinerja yang tinggi, kelompok ini harus menggalang kerjasama dengan institusi-institusi terkait. Yang penting hasil studi dan saran-saran perlu dipublikasikan secara transparan (terbuka), cepat dan seluas-luasnya. Ini semua perlu untuk menambah perbendaharaan kita sebagai bangsa yang sensitif dan apresiatif terhadap persoalan-persoalan sosial yang betapa pun akan selalu ada selama ada peradaban manusia.

Sebagai penutup uraian ini, mari kita ingat satu aksioma dalam komunikasi, “Bagaimanapun canggihnya sumber dan media, komunikasi akan tetap dianggap kebohongan dan kebohongan, jika isi pesannya tidak mencerminkan kenyataan menurut makna yang dipersepsikan dan dirasakan khalayak.” Tidak ada manfaatnya isi pesan yang muluk-muluk jika tidak didukung oleh perubahan iklim atau lingkungan manusia yang lebih baik. Oleh karena itu, harus dihilangkan atau minimal ditekan semua faktor objektif yang selama ini menghantui rakyat, yaitu frustrasi kronis yang disebabkan oleh langkanya perlindungan hukum, keadilan, dan kejujuran, kebebasan, hak asasi. Dilandasi pula oleh merebaknya pengangguran dan kemelaratan berkepanjangan, ancaman, penghinaan, pelecehan, pemaksaan.

Ketertiban, ketenteraman, kegairahan kerja, dan kesejahteraan lahir batin yang dirasakan oleh masyarakat, itulah yang merupakan sumber dan isi paling sah dan terpercaya dari komunikasi yang kita dambakan! ●